



Sepakat Tambah Subsidi Solar

BERLAKU TAHUN INI, TANPA APBNP

JAKARTA-RK. Pemerintah tetap akan menaikkan alokasi anggaran subsidi BBM jenis solar meski tidak ada APBN Perubahan 2018. Besarannya menjadi Rp 2 ribu per liter. Itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian ESDM.

"Iya, mulai tahun ini (kenaikan anggaran, Red)," ucap Dirjen Anggaran Askolani di gedung DPR kemarin (11/7). Meski begitu, Askolani menegaskan bahwa pemberian subsidi energi tersebut akan disesuaikan dengan realisasi penyaluran anggaran hingga akhir tahun.

Pembayaran subsidi bakal dilakukan setelah ada audit BPK atas penyaluran solar pada 2018. "Subsidi itu berdasar realisasinya. Nanti diaudit BPK," kata Askolani.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto pada kesempatan sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan besaran subsidi solar Rp 2.000 per liter. Itu berdasar hasil rapat dan perhitungan yang dilakukan Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina.

Tambahan subsidi solar memang diperlukan Pertamina agar keuangan perseroan tetap sehat. Sebab, dengan kenaikan harga minyak dunia, harga solar dan premium ditetapkan pemerintah tidak naik hingga 2019. Padahal, harga solar tidak naik sejak April 2015.

Pada waktu itu harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di angka USD 57,58 per barel. Sementara itu, saat ini ICP Juni tembus di angka USD 70,36 per barel. Apalagi, Pertamina juga masih harus mendapatkan tambahan penugasan untuk penyaluran premium di Jawa, Madura, dan Bali sebesar 4,3 juta kl.

Dengan demikian, total kewajiban pre-

ESDM," ujarnya.

Dia menambahkan, semua bergantung pada Kementerian ESDM. Termasuk skema penetapan kenaikan subsidi solar tersebut. Waktu penerapannya juga menunggu keputusan dari Kementerian ESDM. "Nanti menteri ESDM yang mengumumkan. Pokoknya tunggu dari menteri ESDM," ujarnya.

Di sisi lain, konsumsi solar bersubsidi pada periode Januari-Mei 2018 mencapai

5,85 juta kl. Pemerintah menetapkan alokasi subsidi solar dalam APBN 2018 sebesar 15,6 juta kl setahun. Atau, rata-rata konsumsi solar sekitar 6,5 juta kl untuk lima bulan.

Dengan begitu, konsumsi solar hingga Mei masih 10 persen di bawah penetapan alokasi APBN 2018. Realisasi konsumsi itu juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 6,05 juta kl. Salah satu penyebab penurunan penggunaan solar bersubsidi adalah adanya konversi penggunaan solar ke elpiji oleh nelayan. (*Jawa Pos/JP/G*)

Sama seperti solar, harga premium dipatok pemerintah Rp 6.450,00 per liter. Angka tersebut tidak mengalami kenaikan sejak April 2015. Pada Januari-Februari, Pertamina harus menanggung kerugian Rp 5,5 triliun akibat tidak adanya kenaikan harga premium dan solar di tengah meroketnya harga minyak dunia.

